

filsafah bangsa Indonesia. Desa sebagai sumber kekuatan Pembangunan bangsa memunculkan sintesa bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi. Landasan falsafah dari Demokrasi Pancasila ini di dasarkan oleh musyawarah mufakat yang di wujudkan dalam bentuk rembung desa.

Desa merupakan bentuk pemerintahan tradisional yang tetap dapat bertahan dengan nilai-nilai budaya, sejarah dan adatnya. Desa sebagai pemerintahan tradisional telah menganut nilai-nilai demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahannya. Dalam sistem pemerintahan desa telah dikenal sistem demokrasi yang terlihat dengan adanya musyawarah yang dilakukan untuk mencapai mufakat dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam desa. Dalam musyawarah ini masyarakat desa memiliki hak suara untuk dapat berkumpul dan mengajukan aspirasinya. Bentuk lain dari sistem demokrasi di desa dapat kita lihat dengan melihat dalam proses pemerintahan tradisional dalam pemilihan pemimpin desa yang akan memimpin desanya.

Sistem pemerintahan tradisional tersebut berbeda-beda di tiap daerah namun pemerintahan tersebut bertujuan sama dengan landasan demokrasi yakni sebuah masyarakat yang terdiri atas sejumlah warga negara yang berkumpul dan melaksanakan sendiri pemerintahannya. Pemerintahan desa di dasari dengan oleh prinsip pemerintahan yang baik seperti keterbukaan, partisipasi pertanggungjawaban dan penegakan hukum untuk mengarahkan budaya politik. Pemerintahan tradisional ini menganut nilai-nilai demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahannya dengan mempertahankan nilai-nilai budaya, sejarah dan adat istiadatnya. Desa merupakan miniatur dari bangsa dan negara Indonesia karena

dalam desa terdapat unsur-unsur yang ada dalam negara Indonesia seperti wilayah tempat masyarakat berkumpul dan bertempat tinggal, masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dan pemerintahan yang berfungsi mengatur masyarakat. Sehingga dalam desa dapat di gunakan sebagai cermin dari Indonesia karena di dalam desa terdapat aspek-aspek yang saling mempengaruhi dalam masyarakat desa seperti juga sistem politik yang mengatur desa tersebut sebagaimana yang terdapat dalam negara.

Pada tahun 2015 pemerintah khususnya pemerintah sampang memberikan kebijakan untuk melaksanakan pemilihan kepala desa serentak, dimana pemilihan serentak ini akan dilakukan oleh kecamatan Ketapang pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 seperti yang kita ketahui pemilihan kepala desa yang sering di singkat pilkades mungkin bukan istilah yang asing lagi untuk saat ini. Sebagai wadah untuk menampung aspirasi politik rakyat sekaligus sebagai sarana pergantian atau kelanjutan pemerintahan desa. Pilkades di harapkan mampu memenuhi keinginan masyarakat untuk mengangkat calon yang sebagai kepala desa, pilkades merupakan instrument dalam pembentukan pemerintahan modern dan demokratis.

Pemilihan Kepala Desa sebagai ajang konsolidasi politik di tingkat desa memberi pendidikan politik yang mencerdaskan masyarakat. Karenawarga secara terbuka dihadapkan dengan bakal calon atau calon pemimpinnya. Pemilihan Kepala Desa tentu identik dengan kampanye-kampanye yang berbau politik, karena calon pemimpin yang akan dipilih adalah pemimpin yang dapat membanwa pembangunan untuk desa itu sendiri. Hal yang menarik untuk dikaji

dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa adalah tahapan kampanye dimana masing-masing calon kepala desa berlomba-lomba memperkenalkan diri, memberikan janji-janji, melakukan pendekatan dengan masyarakat desa, dan beberapa pendekatan lainnya melalui proses komunikasi politik, baik dilakukan secara langsung oleh calon kepala desa maupun oleh tim suksesnya. Pemilihan kepala desa merupakan arena kontestasi politik demokrasi yang ditandai oleh mobilisasi berbagai sumber daya (modal) kekuasaan. Sumber daya kekuasaan dalam bentuk sosial, cultural, sampai sumber daya ekonomi yang menjadi generator dinamika konflik politik. Karena penyelesaian isu teknis seringkali dibersamai oleh pengelolaan mobilisasi sumber daya kekuasaan oleh para calon kepala desa dalam pemilihan langsung. Akibatnya dinamika konflik politik dalam pemilihan kepala desa seringkali meruncing menjadi konflik kekerasan dan anarkis.

Dalam setiap pelaksanaan pemilihan kepala desa sering kita jumpai kekerasan yang mengancam keselamatan jiwa, fisik manusia maupun harta benda. Kekerasan merupakan tindakan berlebihan yang dilakukan demi melindungi dan memperjuangkan nilai serta kepentingannya.¹ Tindakan kekerasan berimplikasi kepada pelecehan kemanusiaan dan demokrasi yang menjamin eksistensi dan perjuangan hak asasi manusia.

Berbicara tentang kekerasan politik, tidak bisa mengabaikan pembahasan tentang kekerasan politik yang terjadi dalam pemilihan kepala desa di desa ketapang laok kecamatan ketapang kabupaten sampang. Kekerasan politik dalam

¹Henk Schult Nordholt, *Kriminalitas Modernitas dan Identitas*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002, hlm. 2.

pemilihan kepala desa, telah melanggar hak asasi manusia. Baik kekerasan yang dilakukan antar massa. Ataupun kekerasan personal, maupun kekerasan struktural. Meskipun data yang ada dalam laporan pelanggaran pemilihan kepala desa lebih menunjukkan bahwa kekerasan politik dalam pemilihan kepala desa di desa ketapang laok lebih banyak dilakukan oleh aparat, dengan motif menegakkan hukum. Hal ini bisa kita lihat dalam setiap pelaksanaan pemilihan kepala desa yang selalu diwarnai dengan kecurangan-kecurangan politik. Contohnya, pemanfaatan milik negara oleh golongan tertentu. Meluasnya kolusi antara aparat dengan kontestan tertentu untuk mendapatkan kemudahan dalam proses pemilihan umum.

Sebagaimana yang sudah di jelaskan di atas, penelitian ini adalah politik kekerasan. Politik kekerasan yang terjadi di ketapang laok terjadi dengan aktivitas penutupan jalan seperti merusak fasilitas umum dan carok sehingga menelan banyak korban. Karena itu tidak salah bila C. Right Mills mengatakan bahwa politik, kekuasaan dan kekerasan saling memperkuat satu sama lain. Karena "Semua politik pada hakekatnya adalah pertarungan kekuasaan; dan hal paling pokok dari kekuasaan adalah kekerasan"²

Pesta demokrasi yang dilakukan oleh pemerintahan terkecil ini pada dasarnya sudah di atur dalam perundang-undangan desa tentang tata cara penyelenggaraan pilkades sehingga seluruh rangkaian tahapannya mulai dari pembentukan panitia sampai kepada pelantikan kepala desa terpilih diharapkan sesuai dengan

² Jurnal. A Made Supriatna, "Kekerasan, Pembangunan dan Militerisasi" dalam Busyro M (eds) *Kekerasan Politik yang Over Acting*, hlm.81. Kamis, 11 februari 2016.

ketentuan yang sudah di tentukan. Dengan demikian proses pemilihan kepala desa akan berjalan dengan baik seperti yang diharapkan oleh semua masyarakat.

Namun pada praktiknya pemilihan kepala desa yang sudah di atur oleh perundang-undangan pemerintah untuk saat ini sangat sulit untuk terselenggara dengan lancar dan baik, karena bermainnya faktor-faktor kepentingan politik. Kepentingan untuk merebut kekuasaan ketimbang hakikat yang di ingini, di samping itu penyelenggaraan pilkades tersentuh dan juga tidak terlepas dari pengaruh kebudayaan.

Seiring dengan hal ini didalam pelaksanaan pilkades tidak jarang terjadi atau menuai kericuhan dan konflik didalam penyeleggaraan pesta demokrasi ini terdapat masalah dan persoalan sebagai gejala awal konflik pilkades yang diwarnai kericuhan kekerasan yang dapat merusak keutuhan masyarakat. Situasi yang memprihatinkan ini tidak jarang lagi terjadi di berbagai daerah, seperti didaerah kecamatan ketapang kabupaten sampang yang pelaksanaan proses pilkades di warnai dengan persaingan yang tidak sehat, kericuhan, kekerasan yang akhirnya menuai konflik.

Dalam menjelang pemilihan kepala desa di kecamatan ketapang laok sangat banyak menuai konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sehingga menjadikan masyarakat tidak serukun antar tetangga maupun masih dalam ikatan saudara, seperti yang di ketahui bahwa masyarakat Madura, khususnya masyarakat kecamatan ketapang sangat erat hubungannya atau yang memiliki kekeluargaan yang sangat erat, akan tetapi hubungan tersebut hancur ketika

pilkades tiba, hal ini sudah terjadi di desa yang ada di kecamatan ketapang. Salah satu konflik yang sering terjadi yaitu runtuhnya hubungan kekeluargaan.

Kekerasan terjadi seperti pembacokan antar pendukung, pemblokiran jalan-jalan yang ada di desa sehingga mempersempit aktivitas masyarakat tersebut di karenakan konflik pilkades, seperti yang sudah terjadi di desa ketapang laok, dimana konflik yang terjadi di sana merupakan salah satu calon tidak di perbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala desa oleh panitia pilkades tersebut sehingga terjadi kekerasan, dengan adanya kekerasan di ketapang laok sudah dikatakan menjadi desa yang tidak aman karena salah satu kubu saling mengancam, sampai-sampai jalan desa di blokir lebih tepatnya di gali sehingga tidak bisa di lewati oleh kendaraan bermotor, sampai pada akhirnya ada salah satu yang memberontak sehingga terjadi kekacauan dan menimbulkan banyak korban ada yang luka-luka dan lumayan parah.³

Akhirnya, yang lebih memprihatinkan ialah tidak sampainya surat suara, surat suara tidak di bagikan secara merata. Merebaknya intimidasi terhadap pemilih supaya menjatuhkan pilihannya kepada kontestan tertentu. Sering terjadi penyimpangan politik ketika pemilihan kepala desa di desa ketapang laok. Di mana aktor-aktor yang berkepentingan disana memiliki kekuasaan yang penuh untuk memainkan surat suara. Keanean yang terjadi di desa ketapang laok seperti halnya dalam pilkades yakni sering terjadi kecurangan dalam pembagian surat suara dimana masyarakat yang tidak memilih abdussalam tidak diberikan hak pilih nya. Dan disitulah mulai menimbulkan konflik antara Abdussalam selaku

³Wawancara dengan bapak Muhammad Hasan, pada tanggal 02 Desember 2015, pada jam 12:30.

pemenang pilkades 2015 dengan Mattaher selaku lawannya dan ternyata antara Mattaher dengan Abdussalam ada hubungan kekerabatan.

Letak ketertarikan peneliti dalam mengambil judul “Fenomena Politik Kekerasan dalam Pilkades di Desa Ketapang Laok Kec. Ketapang Kab. Sampang” adalah di desa Ketapang Laok untuk kesekian kalinya terjadi politik kekerasan atau kekerasan politik pada pra pilkades maupun pasca pilkades. Peneliti disini ingin mengungkap apa motif dan dan bagaimana bentuk kekerasan politik yang terjadi di desa Ketapang Laok.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah dalam menganalisis obyek dan subyek penelitian maka dianggap perlu adanya pembatasan masalah dalam bentuk rumusan masalah, dan adapun rumusan masalah tersebut yaitu :

1. Bagaimana Politik Kekerasan dalam pilkades di desa Ketapang Laok Kec. Ketapang Kab. Sampang ?
2. Apa motif dari terjadinya politik kekerasan pada pilkades desa Ketapang laok Kec. Ketapang Kab. Sampang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk menganalisis politilk kekerasan dalam pilkades di desa ketapang laok kec. Ketapang kab. Sampang ?

2. Untuk mendeskripsikan motif dari terjadinya politik kekerasan dalam pilkades di desa ketapang laok kec. Ketapang kab. Sampang ?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi peneliti dan khalayak umum, lebih khususnya bagi para akademisi dan intelektualis dapat dijadikan sebagai rujukan konseptual dalam dunia keilmuan dan sebagai landasan awal untuk melakukan penelitian lanjutan nantinya.

Bagi Intsansi terkait dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan agenda kerja dan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan tema yang ditulis oleh peneliti.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis untuk memperkaya kahazanah kajian ilmu politik dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang politik kekerasan.

2. Manfaat Praktis

Adapun secara praktis untuk memberi pemahaman bahwa kemunculan politik kekerasan dapat memperkuat kekuatan politik dan juga untuk membantu peneliti memahami realitas politik di desa Ketapang Laok Kec. Ketapang, Kab. Sampang Madura.

E. Definisi Konsep

Untuk menghindari adanya kesalah pahaman dalam memahami judul dalam karya ilmiah ini dan untuk memperjelas interpretasi, pendapat atau pandangan teoritis terhadap pokok bahasan proposal yang berjudul “Fenomena Politik

Kekerasan dalam Pilkada di Desa Ketapang Laok Kec. Ketapang Kab. Sampang Madura” maka akan di jelaskan sedikit mengenai istilah-istilah yang terangkai pada judul dan konteks kebahasaannya.

1. Fenomena

Fenomena adalah suatu kejadian permasalahan yang ada di sebuah tempat ataupun daerah tertentu. Fenomena juga dapat dikatakan sebagai suatu rangkaian peristiwa atau bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kaca mata ilmiah atau lewat disiplin ilmu tertentu. Fenomena dapat terjadi di semua tempat yang dapat diamati oleh manusia. Fenomena berasal dari bahasa Yunani “phainomenon” atau dapat diartikan sebagai “apa yang terlihat”⁴ Jadi menurut penjelasan di atas dapat diambil sedikit kesimpulan mengenai fenomena, fenomena yakni segala sesuatu yang terjadi sekitar atau sekeliling kita yang dapat kita amati dan teliti lebih lanjut sesuai fakta dan realita yang ada. Dan dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada fenomena politik kekerasan yang terjadi di desa ketapang laok Kec. Ketapang Kab. Sampang Madura, Jawa Timur.

2. Politik Kekerasan

Kekerasan politik bila ditelusuri lewat tingkah laku, selain mengancam jiwa, fisik, serta harta benda, juga mengancam hak berpendapat, berorganisasi, dan hak pilih. Walaupun di satu pihak, kekerasan politik merupakan maksimalisasi pengendalian atau intervensi penguasa dan pemerintah terhadap hak berpendapat, hak berorganisasi, dan hak pilih. Bagi penguasa dan pemerintah, maksimalisasi pengendalian terhadap eksistensi dan kewibawaan serta kebijaksanaan yang

⁴ Pius A Partanto, M. Dahlan Al-Barry, Kamus Ilmiah Populer, Arkola, Surabaya, 2001, hlm; 179

diyakini benar, merupakan hal yang perlu dilakukan. Menurut Johan Galtung, kekerasan itu ada bila manusia dipengaruhi oleh keinginan yang kuat untuk menyakiti, sehingga realitas jasmani dan mental aktualnya berada dibawah realisasi potensialnya.⁵

3. Desa Ketapang Laok Kec. Ketapang Kab. Sampang Madura

Desa ketapang laok berada di ujung selatan kecamatan ketapang kabupaten sampang berjarak 4 km dari pusat kecamatan ketapang Desa Ketapang laok terletak di antara Desa ketapang Buntan Timur-Buntan Barat-Paopale Laok.

F. Ruang lingkup Penelitian

Sesuai latar belakang di atas dan agar penelitian ini tidak menyimpang dari rumusan masalah dan agar lebih spesifik pembahasan skripsi ini. Maka diperlukan yang namanya ruang lingkup penelitian, Dalam penelitian peneliti hanya membatasi pada “Fenomena Politik Kekerasan di Desa Ketapang Laok Kec. Ketapang, Kab. Sampang Madura”.

G. Sistematika Pembahasan

Agar lebih sistematis dan memudahkan untuk memahami hasil penelitian ini, maka peneliti perlu mendiskripsikan sistematika penelitian, yaitu :

BAB I : Pendahuluan (Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penjelasan Judul, Ruang Lingkup Penelitian, Metodologi Penelitian, Telaah Pustaka, Sistematika Pembahasan)

⁵Arbi Sanit (A), “Memahami Kekerasan Politik”, dalam Busyro Muqodas (eds) *Kekerasan Politik Yang Over Aktif*, Yogyakarta : LKBH UII, 1998, hlm. 25.

BAB II : Kajian Pustaka (Teori Politik Kekerasan, Teori Fenomenologi, Penelitian Terdahulu)

BAB III : Metode Penelitian (Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu, Jenis dan Sumber Data, Tahap-Tahap Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Teknik Pemeriksaan Data)

BAB IV : Penyajian Data dan Analisis Data (Setting, Data dan Analisis)

BAB V : Penutup (Kesimpulan, Saran, Daftar Pustaka, Lampiran)

